

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AbdulKadir Muhammad, (2013), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atmosudirjo, P. S. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farida Hasyim, (2019), *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok, (2012), *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Inndonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kotijah, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Bantul: CV-MFA
- Muchtar, S. A. (2014). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Laboratorium Pendidikan fKewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Yang Membahagiakan Rakyatnnya*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum Sosiologi Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Randa Puang, V. M. (2015). *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan* . Yogyakarta: Deepublish
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2017). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Ridwan, HR. (2018). *Hukum Adminnistrasi Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Sadjjino. (2008). *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaskBang Pressindo.
- Subekti , R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sutedi, A. (2017). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* . Jakarta: Sinar Grafika.

Sujamto. (1989). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2017). *Hukum Sosiologi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Soemantri, S. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Soekanto, S. (1985). *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: PT Alumni.

Suwardi. (2015). *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Deepublish.

Internet.

Dian Ayuningtyas, "Tinjauan Yuridis Perizinan Moil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum Di Kota Yogyakarta" diakses terakhir tanggal 27 oktober 2021 pada pukul 21.11 wib.

H. Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, diakses terakhir pada tanggal 4 maret 2022 pada pukul 20.30 WIB

Eka Pratiwi Hardini BR Lubis. 2021. Efektivitas Pengurusan Izin Angkutan Kota Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Molisa 2017, Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal dan Unndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Skripsi. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54.

Peraturan Menteri Perhubungan Angkutan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.